



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 KUDUS (0291) 438713**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus, Januari 2020

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS

Drs. KHOLID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199203 1 005

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
2. penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
3. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
4. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;
5. pengendalian dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika;
7. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
8. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

9. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di lingkungan Diskominfo sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	PNS
SD	1
SLTP	-
SLTA	5
D1	-
D2	-
D3	3
D4/S1	8
S2	7
Jumlah	24

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2019

Sarana prasarana operasional untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

Tabel 1.2 Sarana Prasarana Operasional

No	Sarpras Operasional	Jumlah
1.	Sepeda Motor	7 unit
2.	Mobil	5 unit
3.	Komputer PC	18 unit
4.	Laptop/Notebook	22 unit
5.	Printer	8 unit
6.	Scanner	5 unit
7.	AC	9 unit
8.	TV	5 unit
9.	Hardisk eksternal	16 unit
10.	Server	13 unit
11.	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2019

B. Fungsi Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Fungsi Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 adalah meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan

indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
 - b. Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah.
 - c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi.
 - d. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT.
2. Statistik
Belum optimalnya ketersediaan data Statistik Sektoral.
3. Persandian
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat

menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat / patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik
- c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melaksanakan 5 program dan 9 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.064.803.000,00.

Program dan kegiatan yang telah diperjanjian terdiri dari 5 program dan 9 kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Umum didukung 3 kegiatan
- b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah didukung 1 kegiatan
- c. Program Pengelolaan Persandian didukung 1 kegiatan
- d. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik didukung 2 kegiatan
- e. Program Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi didukung 2 kegiatan

Program-program tersebut mendukung pencapaian 5 sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya indeks SPBE
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik

Penjelasan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.1.**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya indeks SPBE	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	76,64	82	85	87	91
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76	77	78	79	81
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	12%	15%	18%	24%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75-100%	Baik
3.	55-74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, setidaknya ada 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

1. Meningkatnya indeks SPBE

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik
4. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten
5. Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Tahun 2019	% capaian	% capaian tahun sebelumnya Tahun 2018
1.	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks SPBE	2,13	2,73	128%	-141,67%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	76,64	Belum ada hasil penilaian	-	106,05%
3	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76	53,34	70,18%	99.6%
4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	-100%
5	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	9%	100%	100%
	RATA-RATA				99,5%	111,83%

Sumber : Hasil Analisa, 2019

- Menurut tabel 3.2 pengukuran capaian sasaran, dapat dilihat :
- a. Persentase (%) capaian sasaran Meningkatnya indeks SPBE Tahun 2019 sebesar 128%, sedangkan hasil penilaian tahun sebelumnya (Tahun 2018) sebesar 141,67%.
 - b. Persentase (%) capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 belum

ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kudus, sedangkan persentase (%) capaian tahun 2018 sebesar 106,05%

- c. Persentase (%) capaian sasaran meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik Tahun 2019 tercapai 70,13%, menurun dari tahun sebelumnya (Tahun 2018) sebesar 99,6%. Hal ini disebabkan oleh adanya indikator penilaian yang tidak terpenuhi terkait dengan pengelolaan web PPID pembantu (ada dinas yang tidak memiliki web, web desa sebagian besar belum dikelola).
- d. Persentase (%) capaian sasaran meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian sasaran tahun sebelumnya (Tahun 2018) tidak ada karena sasarannya berbeda.
- e. Persentase (%) capaian sasaran meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah Tahun 2019 tercapai 100%, tetap sama dengan tahun sebelumnya (Tahun 2018) sebesar 100%

Capaian kinerja rata-rata untuk Tahun 2019 sebesar 99,5%, terjadi penurunan bila dibandingkan dg capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 96,025%

Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral

Keberhasilan pencapaian Sasaran 5 meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pengelolaan persandian, dengan kegiatan pengelolaan persandian.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.298.091.000,00; anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan dana pajak rokok; secara ringkas komposisi penggunaan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 494.480.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 5.202.861.000,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 600.750.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	% Realisasi
1.	Meningkatnya indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	698.670.000	653.155.314	93,49%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	Program pelayanan administrasi umum	1.834.029.000	1.660.594.340	90,54%
3.	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3.624.392.000	3.485.562.949	96,17%
4.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	121.000.000	103.524.988	83,08%
5.	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	Program pengelolaan persandian	20.000.000	18.612.230	93,06%

Sumber : Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, 2019

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa hampir semua program telah dilaksanakan sesuai target keuangan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 5.918.449.821,00 dengan persentase (%) realisasi anggaran sebesar 93,97%

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	2018	Capaian Kinerja IKU OPD 2019			Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Prog/Keg 2019			Akuntabilitas Keuangan 2019				
			Target	Realisasi	% Capaian			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp.)	% Realisasi	SILPA/ Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP OPD		76,64			Program pelayanan administrasi umum	Survey Kepuasan Masyarakat	77	80,753	105%	1.834.029.000	1.660.594.340	173.434.660	90,54%	9,46%
						Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)	8 dok	8 dok	100%	2.200.000	1.406.800	793.200	63,95%	36,05%

	Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan)	4 dok	4 dok	100%					
	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ, ATA, LPPD, LKjIP)	3 dok	3 dok	100%					
Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar	3 dok	3 dok	100%	1.400.885.000	1.278.960.918	121.924.082	91,30%	8,70%
	Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar	12 dok	12 dok	100%					
	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis ; Laporan Keuangan)	14 dok	14 dok	100%					

	OPD) yang tersusun sesuai standar									
	Jumlah Laporan BMD /sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar	16 dok	14 dok	88%						
Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	18 dok	18 dok	100%	430.944.000	380.226.622	50.717.378	88,23%	11,77%	
	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD (Survey Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindaklanjut Pengendalian, Zona Integritas)	3 dok	3 dok	100%						

						yang tersusun sesuai standar									
						Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara	12 unit	12 unit	100%						
						Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	3 dok	3 dok	100%						
						Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	1 org	1 org	100%						
						Jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1 pkt	1 pkt	100%						
						Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	3 org	0 org	0%						
Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,13	2,73	128%	Program pengembangan teknologi dan sistem informasi	Kebijakan Internal SPBE	1,94	2,53	130%	698.670.000	653.155.314	45.514.686	93,49	6,51%
						Tata Kelola SPBE	1,43	2,14	150%						
						Layanan SPBE	2,55	3,09	121%						

							Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data	5 org	6 org	120%								
							Jenis Jaringan Komunikasi data yang dipelihara	1 jaringan	1 jaringan	100%								
							Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO	8 opd	0 opd	0%	482.155.000	442.033.316	40.121.684	91,68%	8,32%			
							Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring	118 obyck	124 obyck	105%								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Smart City	1 dok	1 dok	100%								
							Jumlah regulasi aplikasi	1 regulasi	1 regulasi	100%								
							Jumlah aplikasi yang terintegrasi	9 aplikasi	8 aplikasi	89%	216.515.000	211.121.998	5.393.002	97,51%	2,49%			
							Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	50 orang	0 org	0%								
Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		76	53,36	70%	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	3.624.392.000	3.485.562.949	138.829.051	96,17%	3,83%			
						Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID	177 org	123 org	69%	105.634.000	101.599.400	4.034.600	96,18%	3,82%			

				Jumlah penerbitan media cetak	500 eksp	500 eksp	100%					
				Jumlah permohonan informasi yang dilayani	12 org	17 org	142%					
				Jumlah Liputan Kegiatan Kepala Daerah	200 berita	220 berita	110%					
				Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)	19 org	19 org	100%					
				Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media	38 kali	7 kali	18%					
				Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan	1 lmbg	1 lmbg	100%					
				Jumlah Kompetisi yang di selenggarakan	1 kmpts	1 kmpts	100%					
				Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media sosial, publikasi media online, media luar	817 kali	1768 kali	216%					
			Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik					3.518.758.000	3.383.963.549	134.794.451	96,17%	3,83%

							ruang, media tradisional, media interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder								
							Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi	4 web	3 web	75%					
							Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi	0	0	0%					
Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral		100%	100%	100%	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	121.000.000	100.524.988	20.475.012	83,08%	16,92%
						Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	Jumlah Publikasi Data statistik	4 dokumen	1 dokumen	25%	121.000.000	100.524.988	20.475.012	83,08%	16,92%
Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian		9%	9%	100%	Program pengelolaan persandian	Persentase fasilitasi persandian	9%	9%	100%	20.000.000	18.612.230	1.387.770	93,06%	6,94%
						Pengelolaan persandian	Jumlah aparaturnya yang mengetahui keamanan informasi	1 orang	1 org	100%	20.000.000	18.612.230	1.387.770	93,06%	6,94%

						Jumlah Asesment keamanan informasi	0 sistem/ aplikasi	0 sistem/ aplikasi	0%					
						Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	3 sistem/ aplikasi	3 sistem/ aplikasi	100%					
						Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi	1 ruang	1 ruang	100%					
Prosentase (%) rata-rata capaian kinerja					99,59%				115%	6.298.091.000	5.918.449.821	379.641.179	93,97%	6,03%

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil dengan kategori **Baik (90,06%)** dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan dukungan capaian sasaran berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya indeks SPBE dengan indikator sasaran indeks SPBE Tahun 2019, hasil penilaian dari pusat belum keluar, sehingga belum ada persentase capaian.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator sasaran Nilai evaluasi SAKIP Tahun 2019, hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah tidak tercapai karena belum ada penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah, sehingga belum ada persentase capaian.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dengan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 tercapai 70,18% , kategori cukup.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten dengan indikator sasaran cakupan

pelayanan data statistik sektoral Tahun 2019 tercapai 100 kategori baik .

5. Sasaran 5 : Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah dengan indikator sasaran persentase fasilitasi persandian tercapai 100%, kategori baik.

Penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar 5.918.449.821,00 dengan persentase (%) realisasi anggaran sebesar 93,97%

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa mendatang adalah dengan melaksanakan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat serta peningkatan hubungan kerjasama vertikal, horisontal, maupun diagonal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kudus, Januari 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. KHOLID, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199203 1 005